



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050 / 249 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2023

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

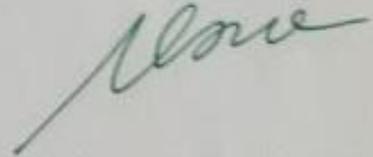
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
  - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050/ 249 /TAHUN 2022

Renja Dinas Perikanan Tahun 2023

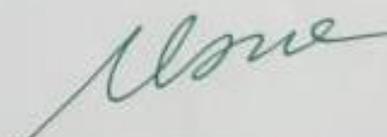
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	

9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	Budi Dwi Nugroho, A.Pi.
11.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	Sabar Laksono, S.Pi, M.M.
12.	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	Muali, S.Pi.
13.	Analisis Akuakultur Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	Intan Aprilia, S.Pi, M.Si.
14.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	Fatkur Rohman, S.H.
15.	Analisis Hasil Perikanan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	Margi Asih, S.IP.

BUPATI PEMALANG,

  
 MUKTI AGUNG WIBOWO



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG**  
**Jalan Alun-alun Timur Nomor 4 Pemalang, Jawa Tengah**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Agustus 2022  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Pemalang



**MUNTOHIR, S.Pi, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620811 198603 1 018



## **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023**



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG**  
**Jalan Alun-Alun Timur No. 4 Pemalang, Jawa Tengah**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS PERIKANAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 523 / 755 / 2023

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- b. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan landasan operasional dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang nantinya akan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2021 - 2026;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perikanan tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
  23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

#### Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan landasan dan pedoman operasional dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2023 yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Oleh sebab itu, Renja ini dilengkapi dengan formulasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

#### Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

- 4.1 Rencana Kerja (Renja)
- 4.2 Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1., sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal, Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Pemalang



**MUNTOHIR, S.Pi, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620811 198603 1 018

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dapat tersusun dan ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Dengan disusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini maka Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2021-2026.

Renja ini juga merupakan bentuk upaya pembangunan sumberdaya perikanan dan pemberdayaan masyarakat perikanan seutuhnya di Kabupaten Pemalang. Oleh sebab itu, Renja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023, dirancang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyampaikan terima kasih atas segala arahan, masukan, dan kerjasama dari semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini dapat tersusun. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari *stakeholders* dan instansi sektor terkait lainnya guna mensukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perikanan di Kabupaten Pemalang.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Pemalang pada masa sekarang dan yang akan datang

Pemalang, Agustus 2022  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Pemalang



**MUNTOHIR, S.Pi, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620811 198603 1 018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	37
2.3. Hasil Evaluasi SAKIP.....	54
2.4. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	55
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	62
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	79
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN.....</b>	<b>86</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	86
3.2. Program dan Kegiatan .....	91
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN .....</b>	<b>107</b>
4.1 Rencana Kerja.....	107
4.2 Pendanaan .....	108
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Sampai Dengan Tahun 2021 .....	12
2.	Tabel 2.2. Persandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2021 untuk Sasaran I .....	31
3.	Tabel 2.3. Persandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2021 untuk Sasaran II .....	34
4.	Tabel 2.4. Pencapaian Program Perangkat Daerah.....	37
5.	Tabel 2.5. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Penganggaran Perangkat Daerah.....	38
6.	Tabel 2.6. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	39
7.	Tabel 2.7. Indikator Kinerja Sasaran .....	39
8.	Tabel 2.8. METADATA I SGGs MATRIK I.....	41
9.	Tabel 2.9. METADATA I. SGGs MATRIK II .....	43
10.	Tabel 2.10. METADATA II. SGGs MATRIK I.....	46
11.	Tabel 2.11. METADATA II. SGGs MATRIK II .....	47
12.	Tabel 2.12. Pengukuran Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang .....	54
13.	Tabel 2.13. Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang .....	55
14.	Tabel 2.14. <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 .....	63
15.	Tabel 2.15. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Tahun 2023 .....	79
16.	Tabel 2.16. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pemalang .....	92
17.	Tabel 2.17. Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan .....	109

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja  
Perangkat Daerah ..... 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan dari OPD yang bersangkutan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Selain daripada itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya, dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program kerja;
- b) Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c) Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023;
- d) Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Pemerintah Daerah.

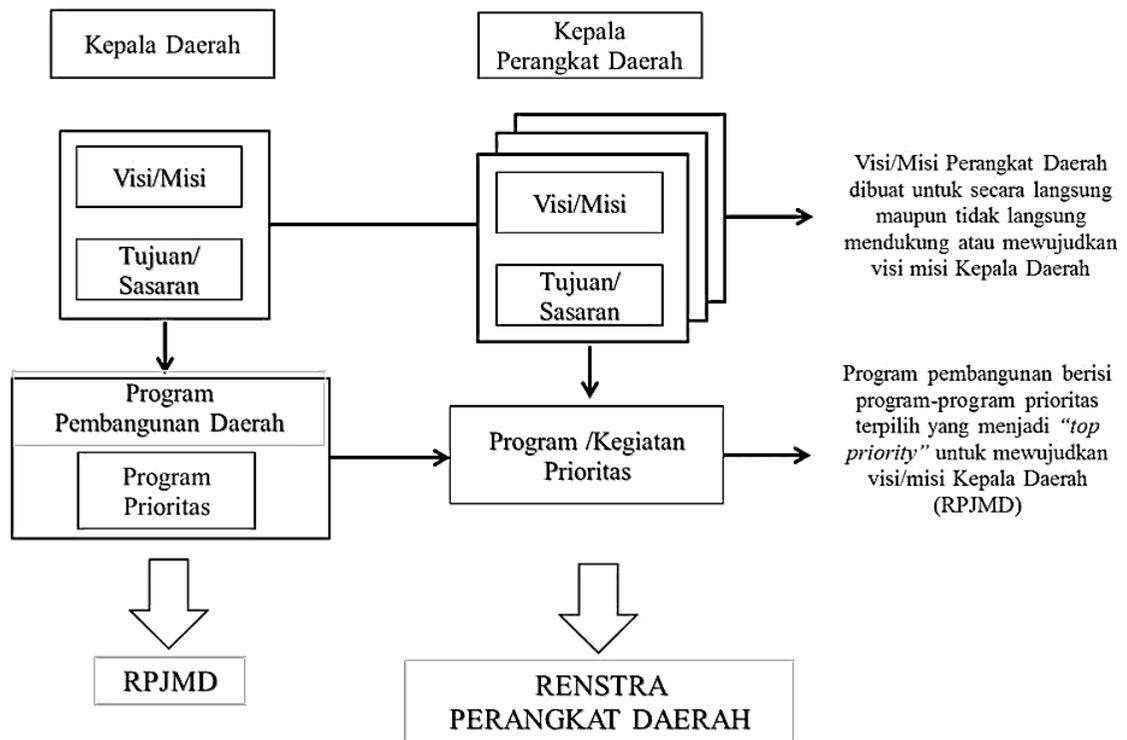
Mengingat arti strategis Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

- a) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;

- b) Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026;
- c) Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**



Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan nomenklatur yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian

sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap. Ayat (2) Pasal 2, menyatakan bahwa setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan kebijakan nasional.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pemalang, maka Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menentukan arah pembangunan yang mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global.

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023, senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2026 dengan Visi "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni" yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah :

- a) Untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman kepada RKPD 2023 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026.
- b) Memberikan pedoman tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) tahun dengan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c) Imbas pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat, disikapi dengan penyesuaian rumusan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang ditetapkan sebagai tahun pemulihan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2023 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam tahun berjalan untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD 2021 - 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN**

- 4.1 Rencana Kerja (Renja)
- 4.2 Pendanaan

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra**

Kegiatan *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang meliputi 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 8 (delapan) urusan pilihan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021 Dinas perikanan Kabupaten Pematang Jaya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Sampai Dengan Tahun 2021**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai evaluasi SAKIP  Indeks Reformasi Birokrasi  Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %				100 %	100 %	100 %	

<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	3 dokumen	9 jenis	3 dokumen	3 dokumen	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah musrenbang perikana yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %

<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dukungan kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100 %	38 orang	38 orang	100 %
3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	10 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	25	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	60 kali	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terselenggaranya</b>	<b>100%</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	4 paket	5 jenis	5 jenis	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %
3	25	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	7 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	4 paket	2 paket	2 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	1 paket	228 eksemplar	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %

3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali, 12 bulan	892 kali	240 kali	240 kali	100 %	240 kali, 12 bulan	240 kali, 12 bulan	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100 %</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	100 %
3	25	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 jenis	-	-	-	-	-	-	-
3	25	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	2 set	47 unit	1 set	1 set	100 %	-	-	-
3	25	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	17 buah	-	4 buah	4 buah	100 %	7 buah	7 buah	100 %
3	25	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 set	23 unit	-	-	100 %	-	-	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100 %</b>
3	25	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	12 bulan	500 surat	500 surat	100 %	500 surat	500 surat	100 %
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bualan	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100 %	4 rekening	4 rekening	100 %

3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM non pns setiap bulan	34 orang	34 orang	34 orang	34 orang	100 %	34 orang	34 orang	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100 %</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100 %</b>
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 kendaraan	54 kendaraan	54 kendaraan	54 kendaraan	100 %	54 kendaraan	54 kendaraan	100 %
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	4 jenis	25 unit	25 unit	100 %	25 unit	25 unit	100 %
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	4 gedung	2 gednung	2 gedung	100 %	2 gedung	2 gedung	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2,13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	Prosentase dukungan terhadap penataan organisasi	--	-	-	-	-	-	-	-
3	25	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-

3	25	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah monitoring evaluasi dan penegndalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Prosentase TPI yang memenuhi standart</b>	<b>10 % (dalam 5 tahun)</b>					69 %	69 %	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya data sumber daya ikan dan terpeliharanya fasilitas tempat pelelangan ikan</b>	<b>100 %</b>					100 %	100 %	100 %
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate / tersedia	5 kali	2 paket	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	100 %
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	5 unit	7 paket	11 paket	11 paket	100 %	5 paket	5 paket	100 %

3	25	03	2,02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana</b>	<b>2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)</b>					2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	100 %)
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	7 kali	4 kegiatan	5 kali	5 kali	100 %	8 kali	8 kali	100 %
3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kegiatan hari nusantara yang terlaksana	1 kegiatan	18 kegiatan	-	-	100 %	-	-	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Jumlah pelaku perikanan yang terlayani</b>	<b>2 kegiatan (protap dan pembinaan)</b>		<b>2 kegiatan (protap dan pembinaan)</b>	<b>2 kegiatan (protap dan pembinaan)</b>	100 %	2 kegiatan (protap dan pembinaan)	2 kegiatan (protap dan pembinaan)	100 %
3	25	03	2,03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (jumlah pemutahiran pelaku perikanan)	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100 %	3 kali	3 kali	100 %

3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI	15 kali	5 TPI	15 kali	15 kali	100 %	15 kali	15 kali	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2,04</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal</b>	<b>2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)</b>					2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	100 %
3	25	03	2,04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	6 kali	-	5 kali	5 kali	100 %	6 kali	6 kali	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang tertangani</b>	<b>10 % (dalam 5 tahun)</b>					10 % (dalam 5 tahun)	10 % (dalam 5 tahun)	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2,02</b>		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina</b>	<b>4 jenis kegiatan</b>					4 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan	100 %

3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	8 kelompok	11 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100 %	8 kelompok	8 kelompok	100 %
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitas badan hukum bagi POKDAKAN	3 kegiatan	9 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitas program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	3 kegiatan	12 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %

3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	5 kelompok	210 ok	4 kelompok	4 kelompok	100 %	5 kelompok	5 kelompok	100 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2,04</b>		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan</b>	<b>3 aktivitas (data, sarpras, kesehatan ikan)</b>					3 aktivitas (data, sarpras, kesehatan ikan)	3 aktivitas (data, sarpras, kesehatan ikan)	100 %
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %

3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Jalan Produksi Desa Mojo (3), Lawangrejo, Danasari Kunjungan Lapangan (Jawa Timur) Normalisasi Saluran Tambak Desa Pesantren dan Mojo (DAK) Pengembangan Jalan dan Jembatan Produksi Desa Ketapang, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Mojo, Desa Kendalrejo(DAK) Rehab TPHT Desa Pesantren, Krantil (Pesantren), Limbangan	13 kegiatan	11 paket	8 kegiatan	8 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	2 jenis	18 paket	2 jenis	2 jenis	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	1 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	2 kegiatan	3 paket	-	-	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase peningkatan pengawasan perairan umum daratan (PUD)</b>	<b>20 % (selama 5 tahun) (112 kelompok nelayan yang sudah ada ditambah (+) target 22 pok nelayan selama lima tahun)</b>						20 % (selama 5 tahun) (112 kelompok nelayan yang sudah ada ditambah (+) target 22 pok nelayan selama lima tahun)	20 % (selama 5 tahun) (112 kelompok nelayan yang sudah ada ditambah (+) target 22 pok nelayan selama lima tahun)	100 %
3	25	05	2,01		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan</b>	<b>1 dokumen</b>						1 dokumen	1 dokumen	100 %

3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan PERDA tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 kali	2 kali	100%
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan</b>	<b>78,87</b>	557 orang	3,45	3,45	100 %	58,87 %	58,87 %	34,4 %
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>2,01</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah data dan informasi poklachsara</b>	<b>3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)</b>					3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	100 %
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat halal bagi poklachsar yang dilaksanakan	15 kelompok	17 kelompok	11 kelompok	11 kelompok	100 %	6 kelompok	6 kelompok	100 %

3	25	06	2,02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana</b>	<b>1 kegiatan</b>	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	120 orang	100 %	5 kelompok	5 kelompok	100 %
3	25	06	2,03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan</b>	<b>3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)</b>					3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	100 %
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah safari gemar makan ikan yang terselenggara	2 kegiatan	17 lomba	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	6 pameran	12 pameran	1 pameran	1 pameran	100 %	3 pameran	3 pameran	100 %
---	----	----	------	----	--	--	-----------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Pada tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 program yang dibagi menjadi 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kendaraan bagi Dinas Perikanan guna mencapai Sasaran dan Indikator Kerja Utama (IKU) yang termuat didalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Adapun ringkasan capaian Sasaran dan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran I : Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan
- Indikator : 1) Produksi perikanan budidaya  
Kinerja Utama 2) Produksi perikanan tangkap  
3) Tingkat Konsumsi Ikan (AKI)

Hasil capaian Indikator :

1. Indikator produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 18.652.000 kg, adapun realisasinya adalah sebesar 18.729.495 kg. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator produksi perikanan budidaya untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,42 %;
2. Indikator produksi perikanan tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 17.194.460 kg, adapun realisasinya adalah sebesar 18.396.293 kg. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator produksi perikanan tangkap untuk tahun 2021 adalah sebesar 107,00 %; dan
3. Indikator Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan Tingkat Konsumsi Ikan 33,00 kg/kapita/tahun adapun realisasinya adalah sebesar 30,27 kg/kapita/tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Angka Konsumsi Ikan untuk tahun 2021 adalah sebesar 91,73%.

- b. Sasaran II : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing
- Indikator : 1) Cakupan bina kelompok nelayan  
Kinerja Utama 2) Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina  
3) Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina  
4) Cakupan bina masyarakat pesisir

Hasil capaian Indikator :

1. Indikator cakupan bina kelompok nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 75 kelompok nelayan yang dibina, adapun realisasinya adalah sebesar 78 kelompok nelayan yang dibina. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator cakupan bina kelompok nelayan untuk tahun 2021 adalah sebesar 104,00 %;
2. Indikator cakupan kelompok pembudidaya ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 140 kelompok pembudidaya

ikan yang dibina, adapun realisasinya adalah sebesar 143 kelompok pembudidaya ikan yang dibina. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina untuk tahun 2021 adalah sebesar 102,1 %;

3. Indikator cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 290 usaha pengolahan ikan yang dibina, adapun realisasinya adalah sebesar 292 usaha pengolahan ikan yang dibina. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,69 %; dan
4. Indikator cakupan bina masyarakat pesisir, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 625 orang masyarakat pesisir yang dibina, adapun realisasinya adalah sebesar 625 orang masyarakat pesisir yang dibina. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator cakupan bina masyarakat pesisir untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran dan indikator, yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu dilakukan dengan analisis terhadap capaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran). Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### **Sasaran 1.**

#### **Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan**

Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan merupakan elemen penting yang memiliki peran potensial dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha perikanan merupakan salah satu usaha Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam rangka mendukung program dasar ketahanan pangan Bupati Pemalang guna menyejahterakan masyarakat.

Sasaran Dinas Perikanan dalam peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut perkembangan capaian indikator kinerja sasaran seperti pada tabel dibawah ini. Persandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2021 untuk sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan

**Tabel 2.2.**  
**Persandingan capaian indikator kinerja tahun 2020**  
**terhadap tahun 2021 untuk Sasaran I**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)	Prosentase Kenaikan/ Penurunan ketercapaian target (%)
Jumlah produksi Perikanan Tangkap (kg)	16.857.314	18.096.881	107,35	17.194.460	18.396.293	106,99	1,65
Jumlah produksi Perikanan Budidaya (kg)	17.638.000	17.800.168	100,92	18.652.000	18.729.495	100,42	5,22
Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	32	34,46	107,69	33	30,27	91,73	(8,27)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2021 mengalami kenaikan ketercapaian target sebesar 1,65 % dibandingkan tahun 2020.

Perikanan tangkap terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum di Kabupaten Pematang Jaya. Produksi penangkapan laut berasal dari Tempat Pelelangan Ikan, sedangkan produksi perairan umum berasal dari perikanan darat yang dilelangkan melalui Koperasi Perikanan Darat.

Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap diantaranya : bantuan BBM, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan benih untuk perikanan darat.

Perlu disampaikan bahwa naiknya prosentase capaian produksi perikanan tangkap terjadi karena banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan ke perikanan darat. Hal ini sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang dirumahkan dari pekerjaannya. Namun khusus untuk masyarakat nelayan, akibat pandemi Covid-19 menyebabkan melimpahnya produksi perikanan tangkap di tempat pelelangan ikan. Kondisi ini disebabkan terjadi kesulitan pemasaran disertai daya beli masyarakat yang menurun, sebagai akibat dari alur pelayaran, sarpras tempat pelelangan ikan, distribusi transportasi mengalami mati suri. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Konsentrasi pendangkalan muara sungai yang meningkat akibat tidak dilakukan pengerukan selama kurun waktu 2-3 tahun, menyebabkan alur pelayaran kapal nelayan terganggu. Alur

pelayaran ini difungsikan nelayan selain sebagai alur masuk-keluar tempat pelelangan ikan, juga sebagai sarana nelayan untuk distribusi hasil tangkapan ikan setelah dilelangkan, mempermudah nelayan menuju-dari docking kapal saat perbaikan, serta melindungi kapal nelayan dari benturan ombak yang dapat menyebabkan kerusakan saat labuh tambat.

2. Melimpahnya produksi perikanan tangkap di tempat pelelangan ikan kurang mendapat dukungan dari sarpras tempat pelelangan ikan. Hal ini tampak beberapa sarpras tempat pelelangan ikan yang sudah rapuh karena kurang terpelihara. Sebagai contoh : langit-langit tempat pelelangan ikan, lantai, timbangan, gerobak angkut ikan, serta rob di tempat pelelangan perikanan darat yaitu di koperasi perikanan darat. Dampak dari kondisi ini adalah disaat produksi yang melimpah tidak mendapat penanganan yang segera maka akan mengakibatkan penurunan kualitas dan menyebabkan kerugian bagi nelayan.
3. Sedangkan kekurang terpeliharanya sarana distribusi pemasaran menyebabkan pembeli maupun pedagang khususnya dari luar pemalang kesulitan menuju tempat pelelangan ikan sehingga menurunkan minat dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2021 mengalami kenaikan ketercapaian target sebesar 5,22 % dibandingkan tahun 2020.

Perikanan budidaya terdiri dari tambak dan kolam di Kabupaten Pemalang. Produksi perikanan budidaya berasal dari Tempat Pelelangan Hasil Tambak.

Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya : normalisasi saluran tambak, pemeliharaan jalan produksi, serta intensifikasi budidaya melalui penambahan padat tebar.

Perlu disampaikan bahwa naiknya prosentase capaian produksi perikanan budidaya terjadi karena peningkatan produksi perikanan budidaya air payau didukung oleh peningkatan produksi perikanan air tawar sebagai akibat banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan ke budidaya ikan khususnya budidaya lele. Hal ini sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang dirumahkan dari pekerjaannya. Namun khusus untuk petani budidaya melalui tambak, akibat pandemi Covid-19 menyebabkan biaya operasional tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh kesulitan operasi pada saat pengolahan tambak sampai pemanenan, disertai kelangkaan pakan akibat terhambatnya arus distribusi. Sebagai akibat dari sarpras jalan dan jembatan produksi, prasarana penahan banjir rob, serta sarpras tempat pelelangan hasil tambak mengalami mati suri. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Luasan tambak budidaya di Kabupaten Pemalang belum terakomodir sepenuhnya oleh pengadaan sarpras jalan dan jembatan produksi dan normalisasi aliran air tambak. Hal ini menjadi makin penting dikarenakan situasi lokasi pengadaan tersebut pada area yang rawan banjir rob, sehingga tidak bisa dihindari bahwa pengadaan sarpras jalan dan jembatan produksi serta normalisasi akan selalu sangat dibutuhkan sepanjang tahun.
2. Luasan tambak budidaya di Kabupaten Pemalang sebagian besar berlokasi di sepanjang pantai utara kecamatan ulujami, yang notabene menjadi langganan banjir rob sepanjang tahun. Hal ini diperparah dengan kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan

kenaikan permukaan air laut. Pengadaan waring penahan rob serta kegiatan perbaikan untuk TPHT yang terbanjiri rob sepanjang tahun menjadi sangat penting.

3. Tertanganinya jalan distribusi pemasaran menjadi baik sangat membantu pembudidaya dalam mengatasi biaya operasi yang mahal serta kelangkaan pakan.

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada indikator kinerja jumlah tingkat konsumsi ikan tahun 2021 mengalami penurunan ketercapaian target sebesar 8,27 % dibandingkan tahun 2020.

Tingkat konsumsi ikan terdiri dari pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu olahan, diversifikasi olahan hasil perikanan, kampanye gemar ikan, serta promosi olahan hasil perikanan di Kabupaten Pemalang. Produksi perikanan budidaya berasal dari Tempat Pelelangan Hasil Tambak.

Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan tingkat konsumsi ikan diantaranya : uji mutu, pembinaan dan pelatihan, kampanye gemar ikan, promosi olahan, sertifikasi halal, fasilitasi syarat perijinan usaha olahan, diversifikasi olahan dan kemasan, sosialisasi membudayakan makan, ikan serta keikursertaan dalam pameran.

Perlu disampaikan bahwa turunnya prosentase capaian tingkat konsumsi ikan terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari program bantuan Paket Keluarga Harapan (PKH) : sembako, lauk pauk, dan sejenisnya dimasa pandemi Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan bernilai gizi tinggi, dan kesadaran masyarakat pemalang akan makanan yang sehat dan berkualitas semakin tinggi sehingga menurunkan minat beli masyarakat terhadap olahan hasil perikanan yang sebagian besar diolah masih menggunakan teknik tradisional.

Guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang akan terus fokus terhadap program-program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sehingga produksi perikanan tangkap maupun budidaya dapat terserap. Hal ini juga dapat menumbuhkembangkan sentra-sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketersediaan pasokan ikan secara kontinyu dapat mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disamping itu perlu digalakan promosi produk dan gerakan makan ikan di Kabupaten Pemalang, serta sosialisasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas pengolahan terhadap kelompok-kelompok pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pemalang.

#### **Sasaran 2.**

**Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing**

Pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing merupakan elemen penting yang memiliki peran potensial untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sektor perikanan yang produktif serta memperhatikan aspek-aspek kelestarian sumber daya perikanan merupakan salah satu usaha Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam rangka mendukung program dasar ketahanan pangan Bupati Pemalang guna menyejahterakan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang rasional dan maju. Sasaran Dinas Perikanan dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok

pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut perkembangan capaian indikator kinerja sasaran seperti pada tabel dibawah ini. Persandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2021 untuk sasaran meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing

**Tabel 2.3.**  
**Persandingan capaian indikator kinerja tahun 2020**  
**terhadap tahun 2021 untuk Sasaran II**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)	Prosentase Kenaikan/ Penurunan ketercapaian target (%)
Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	71	75	105,63	75	78	104,00	4,00
Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina (kelompok)	135	135	100,00	140	143	102,10	5,93
Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina (Unit Pengolah Pemasar Ikan-UPI)	285	286	100,35	290	292	100,69	2,10
Cakupan bina masyarakat pesisir (orang)	575	580	100,87	625	625	100,00	7,76

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator kinerja cakupan bina kelompok nelayan tahun 2021 mengalami kenaikan ketercapaian target sebesar 4,00 % dibandingkan tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya cakupan bina kelompok nelayan diantaranya : rekomendasi kartu pas kecil (SIPI), gerai perijinan SIUP, jaminan perlindungan berupa asuransi nelayan, serta pelatihan pelelangan ikan untuk karyawan tempat pelelangan ikan. Perlu disampaikan bahwa naiknya prosentase cakupan bina kelompok nelayan terjadi karena kebutuhan nelayan akan usaha penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama.

Guna meningkatkan cakupan bina kelompok nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang akan terus fokus terhadap program-program pembinaan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas nelayan melalui study banding tempat pelelangan ikan, studi tiru teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, berkoordinasi program-program

pusat dan provinsi untuk pemberdayaan nelayan, serta fasilitasi percontohan dari kabupaten/kota lain.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator kinerja cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,93 % dibandingkan tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya : perbaikan manajemen budidaya dan penerapan teknologi tepat guna, serta pembinaan dan pelatihan pembenihan-pembesaran ikan untuk petambak.

Perlu disampaikan bahwa naiknya prosentase cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina terjadi karena peningkatan pembudidaya air payau yang didukung oleh peningkatan pembudidaya air tawar. Hal ini sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang dirumahkan dari pekerjaannya. Guna meningkatkan cakupan bina kelompok nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya akan terus fokus terhadap program-program pembinaan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas pembudidaya melalui study banding TPHT, studi tiru teknologi budidaya ikan ramah lingkungan, berkoordinasi program-program pusat dan provinsi untuk pemberdayaan pembudidaya, serta fasilitasi demplot dari kabupaten/kota lain.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator kinerja cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina tahun 2021 mengalami kenaikan ketercapaian target sebesar 2,10 % dibandingkan tahun 2020.

Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina terdiri dari pengolah dan pemasar hasil perikanan. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina diantaranya : pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu olahan, diversifikasi olahan hasil perikanan, fasilitasi pemasaran olahan hasil perikanan, serta promosi olahan hasil perikanan.

Guna meningkatkan cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina, Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya akan terus fokus terhadap program-program pembinaan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar ikan melalui study banding rumah produksi, studi tiru teknologi olahan hasil perikanan ramah lingkungan, berkoordinasi program-program pusat dan provinsi untuk pemberdayaan pengolah dan pemasar ikan, serta fasilitasi dalam event dari kabupaten/kota lain.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator kinerja cakupan bina masyarakat pesisir tahun 2021 mengalami kenaikan ketercapaian target sebesar 7,76 % dibandingkan tahun 2020.

Cakupan bina masyarakat pesisir terdiri dari rumah tangga nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir pada umumnya yang berdomisili di wilayah pesisir. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan cakupan bina masyarakat pesisir diantaranya : pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Guna meningkatkan cakupan bina masyarakat pesisir, Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Jaya akan terus fokus terhadap program-program pembinaan dan pelatihan, serta berkoordinasi program-program pusat, provinsi, serta kabupaten/kota lain untuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain daripada tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang mendorong tercapainya sasaran dan indikator program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Mampu merumuskan dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dalam 5 tahun ke depan;
2. Mampu merumuskan ketepatan dalam perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya;
3. Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat perikanan melalui musrenbang internal Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
4. Terlaksananya sinergisitas dengan lembaga/instansi terkait lainnya.

Implikasi yang timbul terhadap capaian sasaran dan indikator program dan kegiatan, guna memberikan pelayanan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala diatas, antara lain :

1. Realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 adalah sebesar 17.800.168 kg atau 100,92 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 17.638.000 kg. Prosentase capaian produksi perikanan budidaya terjadi karena peningkatan produksi perikanan budidaya air payau didukung oleh peningkatan produksi perikanan air tawar sebagai akibat banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan ke budidaya ikan khususnya budidaya lele. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya : normalisasi saluran tambak, pemeliharaan jalan produksi, serta intensifikasi budidaya melalui penambahan padat tebar.
2. Realisasi Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 18.096.881 kg atau 107,35 % dibanding target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan telah melampaui target akhir Renstra 2021. Perlu disampaikan bahwa naiknya prosentase capaian produksi perikanan tangkap terjadi karena banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan ke perikanan darat. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap diantaranya : bantuan BBM, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan benih untuk perikanan darat.
3. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan tingkat konsumsi ikan diantaranya : uji mutu, pembinaan dan pelatihan, kampanye gemar ikan, promosi olahan, sertifikasi halal, fasilitasi syarat perijinan usaha olahan, diversifikasi olahan dan kemasan, sosialisasi membudayakan makan, ikan serta keikursertaan dalam pameran.
4. Perlu disampaikan bahwa turunnya prosentase capaian tingkat konsumsi ikan terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari program bantuan Paket Keluarga Harapan (PKH) : sembako, lauk pauk, dan sejenisnya dimasa pandemi Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan bernilai gizi tinggi, dan kesadaran masyarakat pemalang akan makanan yang sehat dan berkualitas semakin tinggi sehingga menurunkan minat beli masyarakat terhadap olahan hasil perikanan yang sebagian besar diolah masih menggunakan teknik tradisional.

5. Realisasi Produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2020 sebesar 11.360.484 atau 103,28 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Ketercapaian pelayanan tersebut diantaranya; penguatan kelembagaan yang meliputi penambahan kelompok pengolah dan pemasar dan diversifikasi produk olahan. Target produksi hasil olahan perikanan untuk tahun 2021 sampai 2023 ditetapkan meningkat sebesar 5 % setiap tahun.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2016–2021. Adapun program-program yang dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Program Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.,-)	Realisasi (Rp.,-)	Efisiensi (Rp.,-)	Capaian (%)
3. 25. 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	6.322.958.065	6.163.359.501	159.598.564	97,48
3. 25. 03	Program pengelolaan perikanan tangkap	1.272.149.735	1.271.110.500	1.039.235	99,92
3. 25. 04	Program pengelolaan perikanan budidaya	2.014.031.200	2.007.408.700	6.622.500	99,67
3. 25. 05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	139.130.000	139.121.000	9.000	99,99
3. 25. 06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	714.165.000	713.824.000	341.000	99,95

**Tabel 2.5.**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Penganggaran Perangkat Daerah**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)			
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Efisiensi Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)
Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan	Jumlah produksi Perikanan Tangkap (kg)	16.857.314	18.096.881	107,35	1.272.149.735	1.271.110.500	1.039.235	99,92
	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (kg)	17.638.000	17.800.168	100,92	2.014.031.200	2.007.408.700	6.622.500	99,67
	Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ th)	33	-	30,27	-	-	-	91,73

Realisasi indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 serta proyeksi tahun 2022 dan 2023 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Produksi perikanan budidaya	--	--	18.167.140	18.712.154	19.273.519	19.851.724	18.729.495	18.712.154	19.273.519	19.851.724	
	Produksi perikanan tangkap	--	--	18.096.881	18.458.819	18.827.995	19.204.555	18.396.293	18.458.819	18.827.995	19.204.555	
	Produksi hasil olahan perikanan			11.587.694	11.819.448	12.055.837	12.296.953	9.593.045	11.819.448	12.055.837	12.296.953	
	Tingkat konsumsi ikan	--	--	33	-	-	-	30,27	-	-	-	

**Tabel 2.7.**  
**Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)	Prosentase Kenaikan/ Penurunan ketercapaian target (%)
Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	71	75	105,63	75	78	104,00	4,00
Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina (kelompok)	135	135	100,00	140	143	102,10	5,93
Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina (Unit Pengolah Pemasar Ikan-UPI)	285	286	100,35	290	292	100,69	2,10
Cakupan bina masyarakat pesisir (orang)	575	580	100,87	625	625	100,00	7,76

Dari tabel 2.3. diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 adalah sebesar 17.800.168 kg atau 100,92 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 17.638.000 kg. Prosentase capaian produksi perikanan budidaya terjadi karena peningkatan produksi perikanan budidaya air payau didukung oleh peningkatan produksi perikanan air tawar sebagai akibat banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan ke budidaya ikan khususnya budidaya lele. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya : normalisasi saluran tambak, pemeliharaan jalan produksi, serta intensifikasi budidaya melalui penambahan padat tebar.

Realisasi Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 18.096.881 kg atau 107,35 % dibanding target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan telah melampaui target akhir Renstra 2021. Perlu disampaikan bahwa naiknya prosentase capaian produksi perikanan tangkap terjadi karena banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan ke perikanan darat. Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap diantaranya : bantuan BBM, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan benih untuk perikanan darat.

Pelaksanaan kegiatan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 yang mendukung tercapainya peningkatan tingkat konsumsi ikan diantaranya : uji mutu, pembinaan dan pelatihan, kampanye gemar ikan, promosi olahan, sertifikasi halal, fasilitasi syarat perijinan usaha olahan, diversifikasi olahan dan kemasan, sosialisasi membudayakan makan, ikan serta keikursertaan dalam pameran.

Perlu disampaikan bahwa turunnya prosentase capaian tingkat konsumsi ikan terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari program bantuan Paket Keluarga Harapan (PKH) : sembako, lauk pauk, dan sejenisnya dimasa pandemi Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan bernilai gizi tinggi, dan kesadaran masyarakat pemalang akan makanan yang sehat dan berkualitas semakin tinggi sehingga menurunkan minat beli masyarakat terhadap olahan hasil perikanan yang sebagian besar diolah masih menggunakan teknik tradisional.

Realisasi Produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2020 sebesar 11.360.484 atau 103,28 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Ketercapaian pelayanan tersebut diantaranya; penguatan kelembagaan yang meliputi penambahan kelompok pengolah dan pemasar dan diversifikasi produk olahan. Target produksi hasil olahan perikanan untuk tahun 2021 sampai 2023 ditetapkan meningkat sebesar 5 % setiap tahun.

**Tabel 2.8.**  
**METADATA I. SGGs MATRIK I**

GOAL / TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR DAERAH / PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET									KET
							2019			2020			2021			
							T	R Semester I	R Semester II	T	R Semester 1	R Semester 2	T	R Semester 1	R Semester 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)							
<b>GOAL 14. Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan</b>																
14.5. Pada tahun 2022, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi laut	Luas Mangrove dan Sabuk Hijau Pantai Ha	DISPERIK	Km/Ha	128 Ha	138	138.7	141,46	140	140	140	270.7	243.1	27.6	

14.6. Pada tahun 2022, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan .	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Peraturan daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pesisir Darat	DISPERIK	1 buah	-	Naskah Akademik Pengelolaan Pesisir darat	Naskah Akademik Pengelolaan Pesisir darat	Naskah Akademik Pengelolaan Pesisir darat	Peraturan daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan pesisir darat	Raperda tentang pengelolaan pesisir darat	Raperda tentang pengelolaan pesisir darat	Ditinjau kembali dengan didasari RTRW daerah & sebagai mana RDTR Provinsi	Ditinjau kembali dengan didasari RTRW daerah & sebagai mana RDTR Provinsi	Ditinjau kembali dengan didasari RTRW daerah & sebagai mana RDTR Provinsi
14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil ( <i>small-scale artisanal fishers</i> ) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.6.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	DISPERIK	orang	15,750	15,780	15,950	15,950	15,950	15,732	15,932	10,776	7,752	3,024

**Tabel 2.9.**  
**METADATA I. SGGs Matrik II**

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Target dan Realisasi									Alokasi Anggaran 2021	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019			2020			2021					
				T	R Semester I	R Semester II	T	R semester 1	R Semester 2	T	R semester 1	R Semester 2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)									
<b>GOAL 14. MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>															
<i>Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</i>															
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut	Luas Lahan Mangrove	Ha	128	138	138.7	138.7	139	140	140	270.7	243.1	27.6	14,125,000	APBD	Disperik bekerjasama dengan Polres
Kegiatan Pengendalian kerusakan ekosistem	Jumlah mangrove yang ditanam	batang	25,000	25,000	16,500	16,500	25,000	5,500	39,500	10,000	5,000	5,000	10,125,000		
<i>Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</i>															

Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Kg	21,890,350	16,857,314	7,689,462	7,689,462	17,194,460	10,612,535	17,591,174	18,396,293	8,754,759	9,641,534	650,000,000	APBD	Disperik
Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	67	69	71	71	71	45	75	14	7	7	225,000,000		
<b>Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</b>															
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut	Luas Lahan Mangrove	Ha	128	138	138.7	138.7	139	140	140	270.7	243.1	27.6	14,125,000	APBD	Disperik bekerjasama dengan Polres
Kegiatan Pengendalian kerusakan ekosistem	Jumlah mangrove yang ditanam	batang	25,000	25,000	16,500	16,500	25,000	5,500	39,500	10,000	5,000	5,000	10,125,000		
<b>Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan.</b>															
Program Pengembangan Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Kg	21,890,350	16,857,314	7,689,462	7,689,462	17,194,460	10,612,535	18,096,881	18,396,293	8,754,759	9,641,534	650,000,000	APBD	Disperik

Tangkap	tangkap														
Kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha nelayan skala kecil	Jumlah pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha nelayan skala kecil yang terfasilitasi	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	225,000,000		

**Tabel 2.10.**  
**METADATA II. SGGs Matrik I**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET TAHUNAN					Disagregasi Wilayah Adminstrasi
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>TUJUAN 14 MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN</b>												
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Disperik	Jt Ha	430	430	430	430	430	430	Nasional, Provinsi
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Disperik	% (Pelanggaran sector kelautan)	100	100	100	100	100	100	Nasional, Provinsi
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Disperik	orang	10776	10992	11208	11424	11640	11856	Nasional dan Provinsi

**Tabel 2.11.**  
**METADATA II. SGGs MATRIK II**

Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Dan Realisasi												Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			T	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	T	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	T	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	T	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	T	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	T	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
<b>TUJUAN 14 MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDRA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>																	
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional, dan berdasarkan informasi ilmiah yang terbaik yang tersedia																	
Indikator 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan																	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan Perairan Umum Darat (PUD)	%	4	194,350,000	4	194,350,000	4	194,350,000	4	194,350,000	4	194,350,000	4	194,350,000			<b>DISPERIK</b>

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	Jumlah Peraturan Pengelolaan Perikanan yang terbentuk	Dok	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000		
Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	Jumlah Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	Dok	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000	1	194,350,000		

**Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan peningkatan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap peningkatan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan, & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the world Trade Organization (WTO)**

**Indikator 14.6.1.(a) Persentase Kepatuhan pelaku usaha**

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	2	2,004,501,100	4,76	2,004,501,100	2	2,004,501,100	2	2,004,501,100	2	2,004,501,100	2	2,004,501,100		
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana	keg	2	425,000,000	2	425,000,000	2	425,000,000	2	425,000,000	2	425,000,000	2	425,000,000		
Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	keg	7	225,000,000	7	225,000,000	7	225,000,000	7	225,000,000	7	225,000,000	7	225,000,000		

Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan TPI	keg	2	1,099,000,000	2	1,099,000,000	2	1,099,000,000	2	1,099,000,000	2	1,099,000,000	2	1,099,000,000		
Sub Kegiatan Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	Jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI	keg	3	549,800,000	3	549,800,000	3	549,800,000	3	549,800,000	3	549,800,000	3	549,800,000		
Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan TPI	jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI	keg	15	549,200,000	15	549,200,000	15	549,200,000	15	549,200,000	15	549,200,000	15	549,200,000		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	4,79	3,376,496,000	3	3,376,496,000	3	3,376,496,000	3	3,376,496,000	3	3,376,496,000	3	3,376,496,000		

	budidaya															
Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang dibina	orang	105	602,200,000	105	602,200,000	105	602,200,000	105	602,200,000	105	602,200,000	105	602,200,000		
Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Kelompok	8	89,600,000	8	89,600,000	8	89,600,000	8	89,600,000	8	89,600,000	8	89,600,000		
Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	%	5	1,345,300,000	10	1,345,300,000	15	1,345,300,000	20	1,345,300,000	25	1,345,300,000	30	1,345,300,000		

Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklasar	keg	1	301,200,000	1	301,200,000	1	301,200,000	1	301,200,000	1	301,200,000	1	301,200,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah poklasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	kelompok	6	301,200,000	6	301,200,000	6	301,200,000	6	301,200,000	6	301,200,000	6	301,200,000		
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.																
Program Pengelolaan perikanan tangkap																

Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota																	
Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	Kelompok	7	225,000,000	8	225,000,000	8	225,000,000	8	225,000,000	8	225,000,000	8	225,000,000			

### 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian evaluator terhadap capaian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sistem akuntabilitas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang pada tahun 2019-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.12.**  
**Pengukuran Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang**

No	Komponen	2019	2020	2021
1	Perencanaan kinerja (30%)	19,21	13,76	18,98
2	Pengukuran kinerja (25%)	11,88	10	11,56
3	Pelaporan kinerja (15%)	9,06	9,05	9,31
4	Evaluasi internal (10%)	1,75	2,83	2,92
5	Capaian kinerja (20%)	9,07	5,50	8,83
<b>Jumlah</b>		<b>50,97</b>	<b>41,14</b>	<b>51,60</b>

1. Sasaran 1, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 :  
 “Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan”  
 Hasil penilaian capaian indikator kerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang diinterpretasikan melalui pengukuran skala ordinal untuk kinerja organisasi yaitu pada  $\geq 100$  (%) dengan predikat/kategori **Sangat Baik**, dan berkisar di antara  $\geq 85$  s.d  $< 100$  (%) dengan predikat/kategori **Baik**. Hasil tersebut sebagai berikut :
  1. Capaian indikator kinerja produksi perikanan budidaya sebesar 18,729.495 kg dan atau dengan prosentase sebesar 100,42 %, maka dapat predikat **Sangat Baik**;
  2. Capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap sebesar 18.396.293 kg atau dengan prosentase sebesar 106,99 %, maka mendapat predikat Sangat Baik;
  3. Capaian indikator kinerja Angka Konsumsi Ikan (AKI) sebesar 33,00 kg/kapita/tahun atau dengan prosentase sebesar 91,73%, maka dapat predikat **Baik**;
2. Sasaran 2, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 :  
 “Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing”  
 Hasil penilaian capaian indikator kerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang diinterpretasikan melalui pengukuran skala ordinal untuk kinerja organisasi yaitu pada  $\geq 100$  (%) dengan predikat/kategori **Sangat Baik**, dan berkisar di antara  $\geq 85$  s.d  $< 100$  (%) dengan predikat/kategori **Baik**. Hasil tersebut sebagai berikut :
  1. Capaian cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina dengan target 290 UPI dan realisasi 292 UPI atau

- dengan prosentase sebesar 100,69 %, maka mendapat predikat **Sangat Baik**;
2. Capaian cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina dengan target 140 kelompok dan realisasi 143 atau dengan prosentase sebesar 102,1 %, maka mendapat predikat Sangat Baik;
  3. Capaian cakupan bina kelompok nelayan yang dibina dengan target 75 kelompok dan realisasi 78 kelompok atau dengan prosentase sebesar 104,00 %, maka mendapat predikat Sangat Baik;
  4. Capaian cakupan bina kelompok masyarakat pesisir yang dibina dengan target 625 orang dan realisasi 625 orang atau dengan prosentase sebesar 100 % maka mendapat predikat **Sangat Baik**;
3. Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Rp. 10.462.434.000,- dan realisasi Rp. 10.301.433.701,- atau dengan prosentase sebesar 98,46 % (realisasi fisik sebanyak 100%), maka mendapat predikat **Baik**.

Evaluasi dan penilaian tersebut merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang terhadap sistem manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang ternilai baik, serta memperbaiki pelayanan yang ternilai kurang baik. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang terdiri dari : perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

#### 2.4. Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Penelaahan isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, merupakan bentuk inventarisasi permasalahan aktual dan krusial terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Upaya ini dilakukan guna efektivitas penyelesaian pokok permasalahan sehingga diharapkan solusinya dapat tepat guna dan sasaran sesuai dengan proyeksinya dalam rangka peningkatan produksi dibidang kelautan dan perikanan. Inventarisasi permasalahan atau isu strategis dimaksud sebagaimana dijabarkan pada tabel 2.4. dibawah ini :

**Tabel 2.13.**  
**Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang**

No.	Permasalahan	Solusi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Pendangkalan saluran irigasi tambak	Normalisasi saluran tambak	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 234.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 2 (dua) lokasi pekerjaan, dengan asumsi per-lokasi pekerjaan Rp 117.000.000

				(termasuk konsultan perencana dan pengawas)
2	Produksi perikanan tangkap belum optimal	Pembangunan pangkalan pendaratan ikan berupa rabat beton jalan di lingkungan TPI Mojo	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk rabat beton jalan adalah sebesar Rp 77.600.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
		Pemeliharaan tempat pelelangan ikan rutin tahunan, yaitu TPI Tanjungsari, TPI Asemtoyong, TPI Nyamplungsari, TPI Ketapang, dan TPI Mojo	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk 5 (lima) TPI per-tahun adalah sebesar Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
		Penyelenggaraan pengelolaan pelelangan di TPI melalui e-lelang elektronik. Bertujuan untuk meminimalisir bakul/pembeli yang tidak melakukan pembayaran tunai	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 (DPA-Disperik) Pada Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp. 17.800.000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), rincian pekerjaan : BIMTEK

		<p>Pembangunan pangkalan pendaratan ikan berupa Penambahan tempat tambat labuh kapal yang dapat mengakomodir keseluruhan jumlah kapal pada saat akan melakukan pelelangan : TPI Tanjungsari dan Asemtoyong. Bertujuan agar kapal tidak kesulitan saat sandar dikarenakan tempat labuh sesak, serta menghindari kesulitan pada saat membongkar hasil tangkapan</p>	<p>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Asumsi prakiraan anggaran &gt; 1.000.000.000 (diatas) (Satu Milyar Rupiah)</p>
3	Produksi perikanan budidaya belum optimal	<p>Percontohan untuk komoditas potensial baik payau maupun tawar</p>	<p>Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan Diklat.</p>	<p>Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)</p>
		<p>Pengembangan budidaya di lahan tidur dan alih fungsi lahan terdampak rob</p>	<p>Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.</p>	<p>Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)</p>
4	Kurang memadainya kondisi sarana dan prasaran perikanan	<p>Peningkatan jalan dan jembatan produksi</p>	<p>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 318.000.000 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), dengan asumsi per-lokasi pekerjaan Rp</p>

			159.000.000 (termasuk konsultan perencana dan pengawas)	
		Pemberian bantuan waring bagi pembudidaya untuk antisipasi banjir dan rob : Pantai Comal dan Ulujami	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)
		Pembangunan/rehab saluran air kolam UBIAT Randudongkal. Bertujuan untuk memenuhi pasokan air untuk kolam budidaya. Bertujuan untuk percontohan pengelolaan CB/CPIB	Kegiatannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
		Pembangunan/pembuatan gudang pakan yang terpisah dan rehab sedang kolam induk, kolam pembenihan dan pembesaran UBIAT Randudongkal. Bertujuan untuk percontohan pengelolaan CB/CPIB	Kegiatannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
		Pembangunan/rehab jalan produksi budidaya : Lawangrejo, Danasari, Mojo. Bertujuan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 578.250.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

		untuk memperbaiki kerusakan jalan produksi budidaya yang menyebabkan terganggunya akses lalu lintas pembudidaya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional dan panen budidaya		Rupiah), dengan asumsi per-lokasi pekerjaan Rp 192.750.000 (termasuk konsultan perencana dan pengawas)
		Kebutuhan pakan, terdiri dari : pakan induk, pakan larva, pakan benih (nila, lele, gurame, ikan hias)	Kegiatannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
		Kebutuhan benih (pembesaran) : jumlah benih ikan nila 30 ribu ekor	Kegiatannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
		Kebutuhan benih (pendederan koi) : jumlah benih 10 ribu ekor	Kegiatannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan asumsi per-benih Rp 3.000
		Timbangan ikan digital untuk penggantian fasilitas TPI Nyamplungsari dan TPI Asemtoyong yang rusak (error meteran)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

		Kebutuhan air bersih di TPI Ketapang. Bertujuan untuk membersihkan rantai pelepasan, sortirisasi ikan serta penyediaan rantai dingin	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
5	Banjir, Rob dan Abrasi di wilayah pesisir	Pembuatan tanggul penahan ombak disepanjang pantai khususnya pada pantai Kecamatan Comal dan Ulujami. Bertujuan untuk menanggulangi banjir dan rob air laut yang hampir terjadi setiap tahun	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Asumsi prakiraan anggaran > 1.000.000.000 (diatas) (Satu Milyar Rupiah)
6	Menurunnya daya dukung lahan pada beberapa kawasan budidaya perikanan air payau	Pembinaan tentang pola dan musim tebar komoditas, pengembangan budidaya ramah lingkungan dan <i>silvo fishery (silvo fishery)</i> adalah sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan untuk pembudidayaan ikan di darat	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

		dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan)		
7	Belum dilaksanakan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan tidak menerapkan Biosecurity (Penerapan biosecurity adalah sebuah upaya agar tempat budidaya/pembenihan tidak terkontaminasi zat-zat atau organisme berbahaya yang dapat mengganggu proses pemeliharaan)	Pembinaan, monitoring dan pengajuan sertifikasi CBIB untuk pembudidaya	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan Diklat	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
		Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan CBIB bagi pegawai pengelola UBIAT melalui pelatihan dan magang	Kegiatannya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
8	Masih kurangnya tingkat penguasaan teknologi pada sebagian pembudidaya	Pelatihan budidaya dan magang untuk pembudidaya	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
9	Masih rendahnya angka konsumsi ikan	Safari Gemarikan : sosialisasi, pembinaan dan pendampingan tentang manfaat mengkonsumsi ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

			dalam 1 (satu) Daerah	
		Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolah dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil / Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Perkiraan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

### 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Review tersebut tertuang dalam tabel 2.5. berikut :

**Tabel 2.14.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperik	Nilai SAKIP, Indeks RB dan Indek kepuasan masyarakat		6.701.244.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperik	Nilai SAKIP, Indeks RB dan Indek kepuasan masyarakat		6.701.244.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	%	69.859.362	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD tersedianya	%	69.859.362	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	37.233.862	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	37.233.862	

			Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	3 kegiatan	-						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	6.732.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	6.732.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen	6.395.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen	6.395.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	6.782.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	6.782.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	6.282.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 dokumen	6.282.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.027.653.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	5.027.653.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang, 14 bulan	5.021.217.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	38 orang, 14 bulan	5.021.217.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	3.412.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 dokumen	3.412.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	3.023.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	2 laporan	3.023.500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	100%	10.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	1 laporan	10.800.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	10.800.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 kali	10.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%	78.953.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	78.953.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	2 kegiatan, 110 orang	78.953.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	2 kegiatan, 110 orang	78.953.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100%	551.933.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	551.933.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	14.985.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 paket	14.985.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	1.697.950	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	1.697.950	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	114.638.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	1 paket	114.638.850	
Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli			3 jenis	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli				3 jenis			
Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia			1 paket	Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia				1 paket			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperik	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan	1 paket	273.549.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperik	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan	1 paket	273.549.000	

			digandakan					digandakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibeli	1 jenis	13.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibeli	1 jenis	13.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali	170.063.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	240 kali	170.063.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis	52.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3 jenis	52.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	7 unit	52.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	7 unit	52.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	795.851.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	795.851.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	15.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	15.500.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening, 12 bulan	136.799.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	4 rekening, 12 bulan	136.799.900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah SDM non pns setiap bulan	34 orang	643.552.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah SDM non pns setiap bulan	34 orang	643.552.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah	3 jenis	166.192.938	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah	3 jenis	166.192.938	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 kendaraan	51.842.938	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	54 kendaraan	51.842.938	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	39.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	39.400.000	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	74.950.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	74.950.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Prosentase TPI yang memenuhi standart	72 %	538.781.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Prosentase TPI yang memenuhi standart	77 %	538.781.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Persentase TPI yang tertangani	100 %	214.007.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Persentase TPI yang tertangani	100 %	214.007.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	2 kali	44.862.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	2 kali	44.862.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	2 paket	169.145.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	2 paket	169.145.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	59.774.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	59.774.000	
	Pengembangan	Disperik	Jumlah	3 kali	59.774.000	Pengembangan	Disperik	Jumlah	3 kali	59.774.000	

	Kapasitas Nelayan Kecil		pembinaan dan pelatihan kelompok			Kapasitas Nelayan Kecil		pembinaan dan pelatihan kelompok			
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	210.000.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	210.000.000	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	5 TPI	55.320.000	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	5 TPI	55.320.000	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	5 TPI	154.680.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	5 TPI	154.680.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	55.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	55.000.000	

	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	3 kali	55.000.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	3 kali	55.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana yang tertangani		625.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana yang tertangani		625.000.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	1 kegiatan	101.149.700	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	1 kegiatan	101.149.700	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	1 kegiatan	4.780.400	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	1 kegiatan	4.780.400	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan	1 kegiatan	5.587.500	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan	1 kegiatan	5.587.500	

	dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN			dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN			
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pokdakan cipta sejahtera	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	1 kegiatan	30.559.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pokdakan cipta sejahtera	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	1 kegiatan	30.559.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Desa sikasur, desa gedeg, desa tegalsari timur, pokdakan tombro lestari	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang	4 kelompok	60.222.800	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Desa sikasur, desa gedeg, desa tegalsari timur, pokdakan tombro lestari	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang	4 kelompok	60.222.800	

			dilaksanakan					dilaksanakan			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidayaan ikan	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan )	523.850.300	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidayaan ikan	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan )	523.850.300	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	5.853.300	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	1 dokumen	5.853.300	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah peningkatan prasarana budidaya ikan	2 kegiatan	54.975.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah peningkatan prasarana budidaya ikan	2 kegiatan	54.975.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KPD Desa Blendung	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	230.025.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	KPD Desa Blendung	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	230.025.000	

	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	1 paket	200.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	1 paket	200.000.000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	1 kegiatan	32.997.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	1 kegiatan	32.997.000	

	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD)	20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada <b>ditambah (+)</b> target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	71.219.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD)	20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada <b>ditambah (+)</b> target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	71.219.000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	1 dokumen	71.219.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	1 dokumen	71.219.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam	Disperik	Jumlah sosialisasi/kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap, sosialisasi Raperda pengelolaan pesisir daratan	2 kali	71.219.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam	Disperik	Jumlah penyusunan Perda tentang pengelolaan perikanan yang tersusun	2 kali	71.219.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/ Kota					
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	5 %	290.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	5 %	290.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi poklhasar	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	63.202.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi poklhasar	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	63.202.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan	2 kelompok	63.202.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan	2 kelompok	63.202.000	

	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasr yang terlaksana	1 kegiatan	67.804.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasr yang terlaksana	1 kegiatan	67.804.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah poklhasr yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	67.804.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah poklhasr yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	6 kelompok	67.804.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	158.994.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	158.994.000	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	2 kegiatan	101.979.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	2 kegiatan	101.979.000	

	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	1 pameran	57.015.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti	1 pameran	57.015.000	
--	--	----------	--	-----------	------------	---	----------	--	-----------	------------	--

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi program dan kegiatan kategori rutin antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, terdapat perbedaan kenaikan tarif harga;
- 2) Identifikasi program dan kegiatan kategori prioritas antara kebutuhan pada awal penganggaran dan rancangan awal RKPD, belum terakomodir anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

## 2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Jaring aspirasi dimaksud berasal dari masyarakat, baik dari nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, koperasi nelayan, koperasi perairan darat, kelompok masyarakat, serta pihak-pihak pemerhati perkembangan kemajuan perikanan di Kabupaten Pemalang. Media jejaring aspirasi yaitu melalui penyelenggaraan musrenbang atau fasilitasi layanan lainnya yang dapat diakses masyarakat.

Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Hal ini sesuai Pasal 54 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwaislan Raiffat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Penjelasan lainnya dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

**Tabel 2.15.**

### **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Tahun 2022**

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
<b>USULAN TAHUN 2022 (melalui provinsi dan pusat)</b>						
<b>FISIK</b>						
1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Mojo Desa Mojo	Rabat beton jalan di lingkungan TPI Mojo	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
2.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Tanjungsa ri Kecamatan Pemalang Ulujami	Pemeliharaan/ Rehab TPI	1 Paket	195.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
3	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Asemduyong Kecamatan Taman	Pemeliharaan/ Rehab TPI	1 Paket	195.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
4.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Nyamplungsari Kecamatan Petarukan	Pemeliharaan/ Rehab TPI	1 Paket	195.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
5.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Ketapang Kecamatan Ulujami	Pemeliharaan/ Rehab TPI	1 Paket	195.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
6.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Mojo Kecamatan Mojo	Pemeliharaan/ Rehab TPI	1 Paket	195.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
7.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Ketapang Kecamatan Ulujami	Pengeboran air artesis/sumber air tanah	1 Paket	198.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
8.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Asemduyong Kecamatan Taman	Timbangan Elektrik	2 Unit	10.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
9.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Tanjungsari Kecamatan Pemalang Ulujami	Lampu Suar di Muara Sungai Srengseng TPI Tanjungsari	1 Unit	58.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
10.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Asemduyong Kecamatan Taman	Lampu Suar di Muara Sungai Elon TPI Asemduyong).	1 Unit	58.000.000,-	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
11.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Ketapang Kecamatan Ulujami	rehab tambat labuh tpi ketapang	1 Paket	200.000.000	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
12.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kertosari Kecamatan Ulujami	Normalisasi saluran tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
13.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Kaliprau Kecamatan Ulujami	Normalisasi saluran tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
	(satu) Daerah Kabupaten / Kota					
14.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
15.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
16.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Mojo Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
17.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Ketapang Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	200.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
18.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Kertosari Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	200.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
19.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	200.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
20.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	Desa Blendung Kecamatan Ulujami	Pembangunan/Rehab jalan dan jembatan produksi di lingkungan	1 Paket	200.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
	Daerah Kabupaten / Kota		area tambak			
21.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Lawangrej o Kecamatan Pemalang	Pembangunan/Rehab jalan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	100.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
22.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Asemduoyong Kecamatan Taman	Pembangunan/Rehab jalan produksi di lingkungan area tambak	1 Paket	100.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
24.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Blendung Kecamatan Ulujami, Sasaran KPD Blendung	Rehab KPD Blendung	1 Paket	65.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
25.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami, Sasaran KPD Tasikrejo	Rehab KPD Tasikrejo	1 Paket	65.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
26.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami, Sasaran KPD Mino Rejo	Rehab TPHT KPD Mino Rejo, 20 x 15 m2	1 Paket	65.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
27.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	Fasilitas waring untuk antisipasi rob/pasang air laut	1 Paket	40.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
28.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami	Fasilitas waring untuk antisipasi rob/pasang air laut	1 Paket	40.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
	Kabupaten / Kota					
29.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Mojo Kecamatan Ulujami	Fasilitasi waring untukantisipasi rob/pasang air laut	1 Paket	40.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
<b>MUSRENBANG KABUPATEN 2022</b>						
<b>NON FISIK</b>						
30.	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari	Pelatihan Budidaya Ikan Nila	1 Paket	25.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
31.	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Desa Semaya Kecamatan Randudongkal	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	1 Paket	55.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
32.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Danasari Kecamatan Pemalang	Pelatihan Pembuatan Bandeng Gepuk	1 Paket	50.000.000,-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
<b>USULAN TAHUN 2021 (refocusing tahun 2021)</b>						
<b>FISIK</b>						
37.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Mojo Desa Mojo	rehab tempat paker dan gudang tpi mojo	1 Paket	200.000.000	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
38.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Asemduyong, Desa Asemduyong	rehab lantai tpi asemduyong	1 Paket	200.000.000	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan
39.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	TPI Nyamplungsari, Desa Nyamplungsari	finishing pembangunan mushola tpi nyamplungsari	1 Paket	200.000.000	Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
40.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	Normalisasi saluran tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
42.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami	Normalisasi saluran tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
43.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Mojo Kecamatan Ulujami	Normalisasi saluran tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
44.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Desa Ketapang, Blendung Kecamatan Ulujami	Normalisasi saluran tambak	1 Paket	150.000.000,-	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
45.	Peningkatan Jalan Produksi Desa Danasari	Desa Danasari Kecamatan Pemalang	rabat beton jalan produksi menuju tambak	1 Paket	112.500.000	Diusulkan oleh Kelompok Pembudidayaan Ikan Desa Danasari
46.	Peningkatan Jalan Produksi Desa Lawangrejo	Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang	rabat beton jalan produksi menuju tambak	1 Paket	187.500.000	Diusulkan oleh Kelompok Pembudidayaan Ikan Desa Lawangrejo
47.	Peningkatan Jalan Produksi Desa Tasikrejo	Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami	rabat beton jalan produksi perikanan	1 Paket	150.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Raharjo
48.	Rehab TPHT KPD Limbangan	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami	peningkatan TPHT	1 Paket	90.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Rejo
49.	Rehab TPHT Blok Krantil Desa Pesantren	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	peningkatan TPHT	1 Paket	90.000.000	Diusulkan Oleh KPD Mino Mulyo
50.	Rehab	Desa	peningkatan	1	130.000.000	Diusulkan

No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
	TPHT Desa Pesantren	Pesantren Kecamatan Ulujami	n TPHT	Paket		Oleh KPD Mino Mulyo
<b>NON FISIK</b>						
51.	Pelatihan Budidaya Perikanan	Desa Kaligelang	pelatihan cara pemijahan	30 orang	30.000.000	Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan
52.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Kaligelang	pelatihan cara pemijahan	30 orang	20.000.000	Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan
53	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Kendaldoyong	pelatihan pembuatan pellet mandiri	30 orang	35.000.000	Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan
54.	Apresiasi Teknologi pengolahan produk nilai tambah	Desa Iser dan Desa Moga	Pelatihan diversifikasi olahan ikan	25 orang	25.000.000	Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
55.	Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar	Desa Iser	Pelatihan pemasaran produk berbasis online	25 orang	25.000.000	Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
56.	Apresiasi Teknologi pengolahan produk nilai tambah	Desa Wonokromo dan Desa Tumbal	Pelatihan sanitasi dan higienitas ruang produksi dan pengolahan	25 orang	25.000.000	Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

##### 3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Selanjutnya 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Menindaklanjuti Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu “peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;

6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan dalam renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia tahun 2020-2024 :

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Diantara 9 (sembilan) rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, yang menjadi acuan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, yaitu industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator kinerja produksi perikanan. Rencana strategis tersebut masuk kedalam lingkup Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pembangunan kelautan dan perikanan nasional, yaitu :

1. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional;
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Prioritas pembangunan nasional dengan kebijakan tertentu guna percepatan pembangunan, sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, program pemerintah pusat yang direncanakan di wilayah Kabupaten Pemalang, yakni pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya, program pemerintah pusat yang direncanakan di wilayah Kabupaten Pemalang, yakni Kampung Kepiting di Desa Nyamplungsari Kecamatan Petarukan dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami.

### 3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mencapai visi: "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", yang ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada :

1. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di semua kabupaten/kota;
2. Konvergensi program/kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan stunting;
3. Peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan peran BUMD, dengan lebih progresif, realistis, dan kondusif;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0017371, isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
5. Kedaulatan Pangan dan energi;
6. Kesenjangan wilayah;
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Prioritas daerah Jawa Tengah yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yaitu pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus pada peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI),

serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi.

### 3.1.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2023 mengacu pada pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Pemalang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangen (AMAN)".

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut telah dirumuskan enam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, dengan penjelasan bahwa : misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing.

Berdasarkan penjelasan misi diatas maka ditetapkan sasaran daerah yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai ekonomi berbasis potensi lokal. Menindaklanjuti sasaran daerah tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan produksi dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal, dengan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya produksi sektor perikanan, yang mencakup 3 (tiga) sasaran, meliputi :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, dengan indikator kinerja; jumlah produksi perikanan tangkap. Target produksi tahun 2023 sebesar 18.827.995 kg;
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan indikator kinerja; jumlah produksi perikanan budidaya. Target produksi tahun 2023 sebesar 19.273.519 kg;
3. Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan, dengan indikator kinerja; jumlah produksi hasil olahan perikanan. Target produksi tahun 2023 sebesar 12.055.837 kg.

Arah kebijakan Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang terkait dengan Dinas Perikanan yaitu : Peningkatan

Perekonomian daerah dan kesejahteraan Masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur. Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang terkait dengan Dinas Perikanan yaitu : penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana.

#### 3.1.4. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan sector perikanan dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, dituntut untuk menghasilkan produksi perikanan yang meningkat.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten pemalang terkait dengan pencapaian misi kelima dari RPJMD yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Pada Potensi Lokal. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan Program Unggulan yaitu DEWI = Desa Wisata dan KOIN= Kota Industri). Indikator sasaran RPJMD dari misi kelima ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dan sasaran dari RPJMD terkait misi kelima tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

“Tujuan OPD : Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”

“ Sasaran OPD : Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan”

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa dengan ibu kota di kawasan perkotaan Pemalang. Dalam Peraturan Daerah Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 76,63 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap, dan Kawasan yang dimaksud adalah budidaya tambak, budidaya air tawar, fasilitas perikanan tangkap, dan pengolahan perikanan, meliputi:

1. Budidaya tambak direncanakan seluas ± 2.288 hektar meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami;
2. Budidaya air tawar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
3. Fasilitas perikanan tangkap berupa pengembangan dan peningkatan;
4. Pelabuhan Perikanan Pantai dan TPI di Kecamatan Taman; dan
5. Peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan serta sarana dan prasarana TPI yang terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pemalang, Petarukan, dan Ulujami;
6. Pengolahan perikanan meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.

Hal tersebut diatas sebagaimana Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.4/190/2011 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pemalang.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, pada dasarnya kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang terpilih tahun 2021–2026, maka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Pemalang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.16. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan  
Kabupaten Pematang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP, Indeks RB dan Indek kepuasan masyarakat	Disperik		6.753.744.000	DAU		6.753.744.000	
3	25	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas	Disperik	%	69.859.362	DAU		%	69.859.362

						dan fungsi OPD tersedianya							
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Disperik	3 dokumen	37.233.862	DAU		3 dokumen	37.233.862
						Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	Disperik	3 kegiatan	-	DAU		3 kegiatan	-
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	Disperik	1 dokumen	6.732.500	DAU		1 dokumen	6.732.500
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	Disperik	1 dokumen	6.395.500	DAU		1 dokumen	6.395.500
3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Disperik	1 dokumen	6.782.500	DAU		1 dokumen	6.782.500
3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen dokumen DPA SKPD yang disusun	Disperik	1 dokumen	6.432.500	DAU		1 dokumen	6.432.500
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Disperik	2 dokumen	6.282.500	DAU		2 dokumen	6.282.500

					Kinerja SKPD									
3	25	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	Disperik	100%	5.027.653.000	DAU		1	5.027.653.000	
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pns yang disediakan	Disperik	38 orang, 14 bulan	5.021.217.000	DAU		38 orang, 14 bulan	5.021.217.000	
3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Disperik	5 dokumen	3.412.500	DAU		5 dokumen	3.412.500	
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	Disperik	2 laporan	3.023.500	DAU		2 laporan	3.023.500	
3	25	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase administrasi barang milik daerah yang terselenggara	Disperik	100%	10.800.000	DAU		1	10.800.000	
3	25	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah pembinaan, pengawasan dan	Disperik	12 kali	10.800.000	DAU		12 kali	10.800.000	

					Barang Milik Daerah pada SKPD	pengendalian barang milik daerah							
3	25	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah	Disperik	100%	78.953.000	DAU		1	78.953.000
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	Disperik	2 kegiatan, 110 orang	78.953.000	DAU		2 kegiatan, 110 orang	78.953.000
3	25	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran administrasi umum perangkat daerah	Disperik	100%	551.933.800	DAU		1	551.933.800
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Disperik	1 paket	14.985.000	DAU		1 paket	14.985.000
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Disperik	5 jenis	1.697.950	DAU		5 jenis	1.697.950
3	25	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli	Disperik	1 paket	114.638.850	DAU		1 paket	114.638.850

					Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli		3 jenis		DAU		3 jenis	-
						Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia		1 paket		DAU		1 paket	-
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Disperik	1 paket	237.549.000	DAU		1 paket	237.549.000
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibeli	Disperik	1 jenis	13.000.000	DAU		1 jenis	13.000.000
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Disperik	240 kali	170.063.000	DAU		240 kali	170.063.000
3	25	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Disperik	3 jenis	52.500.000	DAU		3 jenis	52.500.000
3	25	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Disperik	7 buah	52.500.000	DAU		7 buah	52.500.000

3	25	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Disperik	3 jenis	795.851.900	DAU		3 jenis	795.851.900
3	25	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Disperik	500 surat	15.500.000	DAU		500 surat	15.500.000
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	Disperik	4 rekening, 12 bulan	136.799.900	DAU		4 rekening, 12 bulan	136.799.900
3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM non pns setiap bulan	Disperik	34 orang	643.552.000	DAU		34 orang	643.552.000
3	25	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Disperik	3 jenis	166.192.938	DAU		3 jenis	166.192.938
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	Disperik	54 kendaraan	51.842.938	DAU		54 kendaraan	51.842.938
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Disperik	25 unit	39.400.000	DAU		25 unit	39.400.000

3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Disperik	2 gedung	74.950.000	DAU		2 gedung	74.950.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase TPI yang memenuhi standart	Disperik	74 %	538.781.000	DAU		79 %	538.781.000
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TPI yang tertangani	Disperik	2 jenis	214.007.000	DAU		2 jenis	214.007.000
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi SDI yang terupdate/ tersedia	Disperik	2 kali	44.862.000	DAU		2 kali	44.862.000
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah fasilitas TPI yang terpelihara dan prasarana yang baik	Kelompok alam lestari Desa Warungpring	2 paket	169.145.000	DAU		2 paket	169.145.000
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	Disperik	2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	59.774.000	DAU		2 kegiatan (pembinaan dan hari nusantara)	59.774.000

						nelayan dan hari nusantara yang terlaksana							
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok	Disperik	3 kali	59.774.000	DAU		3 kali	59.774.000
3	25	03	2,03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terlayani	Disperik	2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	210.000.000	DAU		2 kegiatan (Protap dan pembinaan)	210.000.000
3	25	03	2,03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaku perikanan yang terupdate, jumlah prosedur tetap dalam penyelenggaraan TPI yang terselenggara (Jumlah pemutakhiran pelaku perikanan)	Disperik	5 TPI	55.320.000	DAU		5 TPI	55.320.000
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan TPI (Karyawan, nelayan dan bakul)	Disperik	5 TPI	154.680.000	DAU		5 TPI	154.680.000

3	25	03	2,04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal	Disperik	2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	55.000.000	DAU		2 jenis pelayanan perijinan (PAS dan BPKP)	55.000.000
3	25	03	2,04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal dan pelayanan yang dilaksanakan	Disperik	3 kali	55.000.000	DAU		3 kali	55.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani	Disperik	3% (dalam 5 tahun)	625.000.000	DAU		3 % (dalam 5 tahun)	625.000.000
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang dibina	Disperik	4 jenis kegiatan	101.149.700	DAU		4 jenis kegiatan	101.149.700

3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang dilaksanakan	Disperik	1 kegiatan	4.780.400	DAU		1 kegiatan	4.780.400
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi badan hukum bagi POKDAKAN	Disperik	1 kegiatan	5.587.500	DAU		1 kegiatan	5.587.500
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi program bantuan bagi pembudidaya ikan yang dilaksanakan	Pokdak an Cipta Sejahtera	1 kegiatan	30.559.000	DAU		1 kegiatan	30.559.000
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, Jumlah peserta pelatihan pembudidaya	Desa Sikasur, Desa Gedeg, Desa Tegalsari Timur, Pokdakan	4 kelompok	60.222.800	DAU		4 kelompok	60.222.800

					Pelatihan	ikan yang dilatih, Jumlah studi banding yang dilaksanakan, jumlah peserta bintek atau magang yang dilaksanakan	Tombro Lestari						
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan	Disperik	3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan )	523.850.300	DAU		3 aktivitas (sata, sarpras, kesehatan ikan )	523.850.300
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data luasan lahan yang tersedia, jumlah data produksi yang tersedia	Disperik	1 dokumen	5.853.300	DAU		1 dokumen	5.853.300
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan prasarana budidaya ikan	Disperik	2 kegiatan	54.975.000	DAU		2 kegiatan	54.975.000
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan) panen hasil tambak yang tersedia, jumlah sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan	KPD Desa Blendu ng	2 kegiatan	230.025.000	DAU		2 kegiatan	230.025.000

3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat perekayasa oksigen untuk produksi budidaya yang tersedia, jumlah alat pompa air dan perangkatnya yang tersedia, jumlah induk ikan unggul yang tersedia, jumlah pakan bantuan dan pakan alami yang tersedia	Disperik	1 paket	200.000.000	DAU		1 paket	200.000.000
3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah demplot budidaya perikanan darat ramah lingkungan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan yang dilatih, jumlah studi banding kawasan budidaya yang terlaksana	Disperik	1 kegiatan	32.997.000	DAU		1 kegiatan	32.997.000

3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase peningkatan pengawasan perairan umum daratan (PUD)	Disperik	20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada <b>ditambah (+)</b> target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	71.219.000	DAU		20 % (selama 5 tahun)(112 kelompok nelayan yang sudah ada <b>ditambah (+)</b> target 22 pok nelayan selama 5 tahun)	71.219.000
3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan	Disperik	1 dokumen	71.219.000	DAU		1 dokumen	71.219.000
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam	Jumlah Sosialisasi /Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap, Sosialisasi RAPERDA Pengelolaan Pesisir Daratan	Disperik	2 kali	71.219.000	DAU		2 kali	71.219.000

					Kabupaten/Kota								
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	Disperik	5 %	290.000.000	DAU		5 %	290.000.000
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi poklhasar	Disperik	3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	63.202.000	DAU		3 data (uji kualitas produk, badan hukum, dan sertifikat halal)	63.202.000
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas mutu produk hasil perikanan, badan hukum, sertifikat hahl bagi poklhasar yang dilaksanakan	Disperik	2 kelompok	63.202.000	DAU		2 kelompok	63.202.000
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi poklhasar yang terlaksana	Disperik	1 kegiatan	67.804.000	DAU		1 kegiatan	67.804.000

3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	Disperik	2 kelompok	67.804.000	DAU		2 kelompok	67.804.000
3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Disperik	3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	158.994.000	DAU		3 kegiatan (gemari, lomba masak ikan, pameran)	158.994.000
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah safari gemar makan ikan dan lomba masak ikan yang terselenggara	Disperik	1 kegiatan	101.979.000	DAU		1 kegiatan	101.979.000
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran lokal, regional dan nasional yang diikuti		1 pameran	57.015.000	DAU		1 pameran	57.015.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN**

#### **4.1 Rencana Kerja (Renja)**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, pada dasarnya kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menjalankan satu urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan bidang kelautan dan perikanan. Strategi arah kebijakan Dinas Perikanan adalah “Peningkatan Produksi Perikanan”. Sejalan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang terpilih tahun 2021–2026, maka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Pemalang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran sebagaimana Renstra 2021-2026 adalah melalui program dan kegiatan, yakni 5 program, 20 kegiatan dan 44 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya meliputi :
  - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah.
  - 3) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
  - 4) Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
  - 5) Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
  - 6) Administrasi umum perangkat daerah.
  - 7) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - 8) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
  - 9) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - 10) Penataan Organisasi.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kegiatannya meliputi :
  - 1) Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
  - 2) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
  - 3) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  - 4) Penerbitan Tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT diwilayah sungai, danau, waduk,

- rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, kegiatannya meliputi :
    - 1) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil.
    - 2) Pengelolaan Pembudidaya ikan.
  4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, kegiatannya meliputi :
    - 1) Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air.
  5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, kegiatannya meliputi :
    - 1) Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
    - 2) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
    - 3) Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota.

#### **4.2 Pendanaan**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan, sebesar Rp. 8,247,552,500,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3,632,527,000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,615,025,500,- adapun untuk perincian program dan kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023 dibawah ini..

**Tabel 4.17.**  
**Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan**

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Tahun 2024		
					Target Kinerja	Rp. (-)	Target Kinerja	Rp. (-)	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai evaluasi SAKIP, indeks reformasi dan birokrasi, indeks kepuasan masyarakat		<b>6,362,552,500</b>		<b>6,489,803,550</b>	Disperik
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		<b>69,949,500</b>		<b>71,348,490</b>	Disperik
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perikanan)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	37,324,000	3 dokumen	38,070,480	Disperik

				Jumlah dokumen musrenbang perikanan					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	6,732,500	1 dokumen	6,867,150	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	6,395,500	1 dokumen	6,523,410	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	6,782,500	1 dokumen	6,918,150	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	6,432,500	1 dokumen	6,561,150	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	6,282,500	2 dokumen	6,408,150	Disperik

			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		<b>4,621,461,500</b>		<b>4,713,890,730</b>	Disperik
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang, 14 bulan	4,615,025,500	38 orang, 14 bulan	4,707,326,010	Disperik
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	23 orang, 12 bulan	3,412,500	2 laporan	3,480,750	Disperik
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 laporan	3,023,500	2 laporan	3,083,970	Disperik
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah		<b>10,800,000</b>		<b>11,016,000</b>	Disperik
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada	12 laporan	10,800,000	12 laporan	11,016,000	Disperik

			Perikanan)	SKPD					
			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	Disperik
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	-	-	-	-	Disperik
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		<b>78,953,000</b>		<b>80,532,060</b>	Disperik
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	-	-	-	-	Disperik
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perikanan)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	110 orang	78,953,000	110 orang	80,532,060	Disperik
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah		<b>553,897,900</b>		<b>564,975,858</b>	Disperik
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perikanan)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14,983,000	1 paket	15,282,660	Disperik
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perikanan)	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	5 paket	3,173,600	5 paket	3,237,072	Disperik

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perikanan)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	114,638,300	1 paket, 12 bulan	116,931,066	Disperik
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perikanan)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	237,549,000	1 paket, 12 bulan	242,299,980	Disperik
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perikanan)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1dokumen	12,998,000	1 dokumen	13,257,960	Disperik
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240 laporan	170,556,000	240 laporan	173,967,120	Disperik
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		<b>52,500,000</b>		<b>53,550,000</b>	Disperik
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional / lapangan yang disediakan	-	-	-	-	Disperik
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeuler yang disediakan	-	-	-	-	Disperik
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 unit	52,500,000	17 unit	53,550,000	Disperik
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	Disperik

			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		<b>770,167,900</b>		<b>785,571,258</b>	Disperik
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	500 laporan	15,500,000	500 laporan	15,810,000	Disperik
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	147,299,900	4 laporan	150,245,898	Disperik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	34 laporan	607,368,000	34 laporan	619,515,360	Disperik
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya barang milik daerah		<b>204,822,700</b>		<b>208,919,154</b>	Disperik
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	54 unit	84,795,700	54 unit	86,491,614	Disperik
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	40,027,000	25 unit	40,827,540	Disperik

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perikanan)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 unit	80,000,000	2 unit	81,600,000	Disperik
			<b>Penataan Organisasi</b>	Prosentase dukungan terhadap penataan	-	-	-	-	-
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	-	-	-	-	-
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap		<b>823,781,000</b>		<b>840,256,620</b>	Disperik
			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah data sumber daya ikan yang tersedia, serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang tertangani		<b>499,007,000</b>		<b>508,987,140</b>	Disperik
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Dinas Perikanan)	Jumlah data dan informasi SDI di Perairan Darat dalam 1 Kabupaten/Kota	2 dokumen	44,862,000	2 dokumen	45,759,240	Disperik

				yang tersedia					
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	2 unit	454,145,000	2 unit	463,227,900	Disperik
			<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana		<b>59,774,000</b>		<b>60,969,480</b>	Disperik
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	Jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya	50 orang	59,774,000	50 orang	60,969,480	Disperik
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha	-	-	-	-	-
			<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan TPI yang terselenggara		<b>210,000,000</b>		<b>214,200,000</b>	Disperik
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dinas Perikanan)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	1 dokumen	55,320,000	1 dokumen	56,426,400	Disperik

			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dinas Perikanan)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI	13 layanan	154,680,000	13 layanan	157,773,600	Disperik
			<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal		<b>55,000,000</b>		<b>56,100,000</b>	Disperik
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT (Dinas Perikanan)	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	3 rekomendasi	55,000,000	3 rekomendasi	56,100,000	Disperik
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		<b>650,000,000</b>		<b>669,500,000</b>	Disperik
			<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas		<b>161,869,400</b>		<b>166,725,482</b>	Disperik

				kelembagaan, fasilitasi bantuan pendanaan dan pemberian kemudahan akses IPTEK serta pendidikan dan pelatihan					
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	2 kelompok	52,830,400	2 kelompok	54,415,312	Disperik
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Dinas Perikanan) Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	4 kelompok	18,850,000	4 kelompok	19,415,500	Disperik
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dinas Perikanan)	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1 kelompok	8,909,000	1 kelompok	9,176,270	Disperik
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	3 kelompok	81,280,000	3 kelompok	83,718,400	Disperik

			<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidayaan ikan		<b>488,130,600</b>		<b>502,774,518</b>	Disperik
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten atau kota	1 dokumen	7,473,000	1 dokumen	7,697,190	Disperik
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten atau kota	4 unit	314,824,600	4 unit	324,269,338	Disperik
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten atau kota	2 unit	120,000,000	2 unit	123,600,000	Disperik
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah Kabupaten atau Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	3 dokumen	31,122,500	3 dokumen	32,056,175	Disperik

			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2.179 Ha	14,710,500	2.179 Ha	15,151,815	Disperik
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terpeliharanya Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Darat		<b>71,219,000</b>		<b>71,931,190</b>	Disperik
			<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan		<b>71,219,000</b>		<b>71,931,190</b>	Disperik
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah Dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	71,219,000	2 dokumen	71,931,190	Disperik
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan		<b>340,000,000</b>		<b>346,800,000</b>	Disperik

			PERIKANAN						
			<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia		<b>63,202,000</b>		<b>64,466,040</b>	Disperik
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	3 dokumen	63,202,000	3 dokumen	64,466,040	Disperik
			<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklaksar yang terlaksana		<b>67,804,000</b>		<b>69,160,080</b>	Disperik
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)	Jumlah unit usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala	5 unit usaha	67,804,000	5 unit usaha	69,160,080	Disperik

				usaha dan resiko					
			<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang terlaksana		<b>208,994,000</b>		<b>213,173,880</b>	Disperik
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten atau Kota	10.000 Ton	101,979,000	10.000 Ton	104,018,580	Disperik
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan) yang terfasilitasi	100 pelaku usaha	107,015,000	100 pelaku usaha	109,155,300	Disperik

Keterangan :  
Belum terdanai

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampau ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2023 Dinas Perikanan didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya Perikanan serta tingkat perkembangan yang ingin dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja Dinas Pemalang Tahun 2023 diharapkan berguna sebagai arah, pedoman dan landasan Dinas Perikanan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Selain itu Renja ini juga dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan kelestarian sumberdaya perikanan secara optimal berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat perikanan yang berdaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan.

Pemalang,            Agustus 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Pemalang



**MUNTOHIR, S.Pi, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620811 198603 1 018